

FORMALISASI DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN PESANTREN

Ahmad Ta'rifin
Muhlisin
Maskhur
Miftahul Ula*

Abstrak: Kajian ini menyimpulkan bahwa upaya formalisasi pendidikan pesantren yang dilaksanakan pada beberapa pesantren di Kota Pekalongan dengan orientasi "setengah hati", tidak diikuti pendirian lembaga pendidikan formal, justru berdampak negatif terhadap perkembangan pesantren. Sebaliknya, jika diikuti dengan pendirian lembaga pendidikan formal seperti MTs dan MA maka berpengaruh terhadap perkembangan pesantren secara kondusif. Formalisasi pesantren juga berdampak terhadap pergeseran pola kepemimpinan pesantren, dari kepemimpinan individu ke kepemimpinan kolektif yayasan; dari sistem pendidikan tradisional ke sistem pendidikan persekolahan; dari kurikulum *kitab kuning oriented* ke *kurikulum integrative*; dan dari metode tradisional salafi yang *kyai oriented* (*weton, sorogan, hapalan, ceramah*) ke metode *student oriented* (*diskusi, resitasi, problem solving, kerja kelompok*) dan lain-lain. Yang menarik, ketika pesantren-pesantren yang diteliti memformalisasikan pendidikannya, kurikulum pesantren salaf yang berbasis *kitab kuning* tetap dipertahankan, sedangkan ilmu umum hanya dijadikan pendukung ilmu agama yang ada di kurikulum salaf. Ilmu umum dipandang sebagai kebutuhan/tantangan modernisasi pendidikan.

Kata Kunci: Formalisasi, Transformasi, Pesantren.

Pendahuluan

Dengan jumlah penduduk muslim sekitar 90 persen (*Kota Pekalongan dalam Angka 2004*), tidak heran jika Kota Pekalongan akrab dengan dunia pesantren, di samping perbatikan (Satoto, 2003). Menurut data Pekapontren Kandepag Kota Pekalongan tahun 2008, tercatat ada 38 pondok pesantren di kota batik yang hampir semuanya bercorak salafiyah. Dari jumlah tersebut, pondok pesantren yang memformalisasikan pesantrennya mencapai 14 pondok pesantren atau sekitar 37 persen (*Pekapontren Kandepag Kota Pekalongan 2008*).

Formalisasi pesantren yang dilakukan oleh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di Kota Pekalongan nampaknya dilakukan dalam rangka merumuskan kembali sistem pendidikannya. Dalam konteks ini, pesantren tengah berada dalam proses pengumpulan antara "identitas dan keterbukaan." Identitas sebagai lembaga pendidikan *indigenous* Indonesia yang memiliki ciri khas sendiri; dan keterbukaan untuk mengadopsi dan mengakomodasi berbagai sistem pendidikan lain.

Formalisasi pesantren juga merupakan terobosan baru bagi pesantren dalam menyikapi perubahan kondisi sosial yang ada, yakni ketika muncul kesadaran di kalangan kyai pengasuh dan santri, bahwa tidak semua alumni pesantren bisa menjadi ustadz, kyai atau mubaligh setelah pulang ke kampung halamannya; yang banyak dari mereka justru menjadi warga biasa yang tidak terlepas dari kebutuhan mencari pekerjaan yang tentu saja memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu (Ziemek, 1985: 197-198; Dawam Raharjo, 1985: ix).

Dalam sejarahnya, formalisasi pesantren dimulai pada awal abad ke-20, ketika sistem madrasah dengan corak klasikal yang sesuai sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Nusantara, sehingga sampai saat ini,

* Peneliti adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan

sebagian pesantren di Indonesia telah memformalisasikan sistem pendidikannya. Pada waktu Mukti Ali menjabat Menteri Agama, ia mengadakan pembaruan pesantren dengan gagasan konvergensi kependidikannya, yakni membuka sekolah-sekolah umum (SD, SMP, dan SMU), di samping madrasah (MI, MTs dan Aliyah) pada lembaga pesantren, dan memasukkan materi pelajaran umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut dengan perbandingan 30% pelajaran umum dan 70% pelajaran agama.

Sejatinya tema tentang formalisasi pesantren telah dikaji oleh beberapa pakar pendidikan di antaranya Husni Rahim dalam buku “*Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*” menulis bahwa pembaharuan pendidikan nasional hendaklah mempertimbangkan kultur pesantren. Menurutnya, praktek sistem pendidikan pesantren yang menerapkan sistem asrama secara kasat mata telah diadopsi oleh sekolah-sekolah unggulan yang populer dikenal dengan nama *boarding school*.

Malik Fadjar menulis tentang Pesantren di dalam buku berjudul “*Reorientasi Pendidikan Islam*”. Malik telah berusaha membongkar sisi negatif dan kelemahan mutu pesantren dibanding pendidikan formal. Misalnya perguruan tinggi dalam menyikapi perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan di era globalisasi ini.

Bentuk formalisasi pendidikan pesantren ini dalam catatan Masykuri Abdillah dan Qodry Azizy meliputi: (1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum); (2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional; (3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah; (4) Pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian; (5) pesantren untuk asrama anak-anak pelajar sekolah umum dan mahasiswa (Masykuri Abdillah, 2001; Qodry Azizy, 2002: viii).

Di antara pondok pesantren yang menformalisasikan pendidikannya di Kota Pekalongan adalah Pesantren Ribatul Muta'allimin asuhan KH. Hasan Rumuzi, Pesantren Al-Arifiyah asuhan KH. Zaenal Arifin, Pesantren Mambaul Falah dan Pesantren Al-Masyhad asuhan K. M. Hasanuddin, Pesantren Mambaul Huda asuhan K. Munawir serta Pesantren Sunan Bonang Al-Hidayah pimpinan Gus Hasan Bisri.

Tema tentang formalisasi pesantren dan dampaknya terhadap transformasi (pergeseran) pendidikan pesantren di Kota Pekalongan layak diangkat dalam sebuah penelitian dengan beberapa alasan. *Pertama*, adanya pengakuan pemerintah bahwa pesantren adalah contoh terbaik dari pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) karena keterkaitan sejarah bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan asli (*indigenous*) Indonesia yang lahir dari perut rakyat (Malik Fajar, 1999: 45-46). Sebagaimana di daerah lain, lahirnya pesantren-pesantren di Kota Pekalongan adalah dari kebutuhan dan untuk masyarakat di mana lembaga itu hidup.

Kedua, banyaknya pesantren di Kota Pekalongan yang memformalisasikan sistem pendidikannya. *Ketiga*, dukungan pemerintah melalui kebijakan Otonomi Daerah (UU No 32/2004) dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdikas) yang mengakui secara eksplisit dan tegas terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lain seperti sekolah umum dan madrasah (UU No 20/2003). Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berusaha menjawab tentang dampak formalisasi pesantren terhadap transformasi pendidikan pesantren di Kota Pekalongan.

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang dampak formalisasi pesantren terhadap transformasi pendidikan pesantren di Kota

Pekalongan, sedangkan dari aspek kepraktisan, studi ini bertujuan untuk meneliti, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kalangan pesantren dan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengungkap lebih dalam tentang dampak formalisasi pesantren terhadap transformasi pendidikan pesantren di Kota Pekalongan, yakni Pesantren Ribatul Muta'allimin Landungsari, Pesantren Mambaul Huda Landungsari asuhan K. Munawir, Pesantren Al-Arifiyah Kebulen asuhan KH. Zaenal Arifin, Pesantren Mambaul Falah asuhan KH. M. Hasanuddin Masyhadi, Pesantren Al-Masyhad pimpinan KH. M. Hasanuddin Masyhadi, dan Pesantren Sunan Bonang Al-Hidayah Sampangan pimpinan Gus Hasan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga didapat data secara komprehensif, mendalam dan luas.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ganda, yaitu: (1) studi empiris (lapangan) yang dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari sumbernya yakni kyai pengasuh pesantren, ustadz, karyawan, dan santri sehingga bisa diketahui realitas sosial pondok pesantren yang diteliti dan (2) studi kepustakaan (literatur) yang ditulis oleh para intelektual dan pakar pendidikan dalam buku maupun laporan-laporan jurnalistik berkaitan formalisasi pesantren dan peningkatan mutu pendidikan serta publikasi ilmiah yang mendukung kajian tersebut. Metodenya, observasi baik langsung maupun tidak langsung dengan mengamati serangkaian data dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasi data yang telah terkumpul kemudian dilakukan deskripsi secara objektif dan sistematis. Setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif (deskriptif) secara logis dan kritis dengan pendekatan studi manajemen pendidikan berkaitan formalisasi Pesantren yang diteliti dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pesantren di Kota Pekalongan.

Hasil Penelitian

A. Model dan Corak Formalisasi Pesantren di Kota Pekalongan

Temuan penelitian ini mempetakan empat model dan corak formalisasi pesantren di Kota Pekalongan, yakni: *Pertama*, model dan corak formalisasi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMA/SMK, dan PT Umum). Dari enam pesantren yang diteliti, Pesantren Ribatul Mutaallimin masuk kategori ini. Pesantren yang beralamat di Landungsari ini menyelenggarakan pendidikan formal berupa madrasah MTs dan MA.

Kedua, model dan corak formalisasi pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. Corak ini diwakili oleh Pesantren Al-Arifiyah Kebulen dan Pesantren Ribatul Mutaallimin Landungsari. *Ketiga*, model dan corak formalisasi pesantren sebagai tempat pengajian saja. Corak ini direpresentasikan oleh Pesantren Mambaul Huda Landungsari dan Pesantren Sunan Bonang Sampangan. *Keempat*, model dan corak formalisasi pesantren untuk pelajar sekolah dan mahasiswa. Corak ini diwakili oleh Pesantren Al-Arifiyah, Pesantren Mambaul Falah, Pesantren Al-Masyhad dan Pesantren Sunan Bonang dan Pesantren Mambaul Huda.

Model dan corak formalisasi pesantren yang terdapat di Kota Pekalongan di atas, nampaknya, pengkategorian yang dibuat Masykuri Abdillah dan Qodry A. Azizy terlalu simplistis, tidak memadai lagi. Karena pada kenyataannya, di Kota Pekalongan dewasa ini, banyak pesantren yang dulunya murni salaf, hanya sebagai tempat pengajian kitab kuning,

kini menyelenggarakan madin, madrasah/sekolah formal, juga menjadi asrama bagi para pelajar dan mahasiswa.

Berdasar corak di atas, formalisasi pesantren tidaklah hanya dipahami, usaha institusi pesantren yang mengembangkan pendidikan formal di bawah manajemen pesantren, seperti MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, PTA/PTU, dan Madrasah Diniyah saja, tetapi dipahami juga sebagai usaha pesantren dalam mengembangkan kelembagaan, kurikulum, pola pembelajaran, dan sistem pendidikannya meskipun polanya melalui majlis taklim dan asrama pelajar dan mahasiswa.

Penjelasan Gus Hasan, pengasuh Pesantren Sunan Bonang menggambarkan pola ini:

Ya..., pada awalnya pesantren kami murni mengajarkan kitab-kitab kuning sederhana seperti: *Ratib Al-Attas*, *Hujjah Ahlus Sunnah*, *Arba'in Nawawiyah*, *Bidayah al-Hidayah*, *Jurumiyah* dan *Sharaf*, *Ta'lim al-Muta'allim*, *Minakhus Tsaniyah* dan *Lughat al-Arabiyyah* untuk kalangan santri dalam (mukim). Pada perkembangannya, kami membuka majlis ta'lim untuk kalangan ibu-ibu di sekitar pondok yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Selain itu, pesantren kami juga menjadi asrama para pelajar sekolah, madrasah, dan mahasiswa STAIN Pekalongan.

Hal senada disampaikan KH. M. Hasanuddin, pengasuh Pesantren Masyhad dan Mambaul Falah Sampangan:

Al-

Pesantren Mambaul Falah termasuk pesantren yang paling awal berdiri di Kota Pekalongan oleh Abah KH. Subki Masyhadi. Di pesantren ini diajarkan kitab kuning dari berbagai disiplin ilmu agama, seperti: Fiqih (*Durorul Bahiyah*, *Fathul Qarib*, *Nahwu-Sharaf* (*Jurumiyah*, *Alfiyah Ibnu Malik*), Tasawuf dan Aqidah (*Minhajul Abidin*, *Nashaih al-Diniyah*, *Akhlak li al-Banin*), dan lain-lain. Pada tahun 1980-1990, kami membuat kebijakan, pesantren boleh dijadikan 'pemandokan' para pelajar dari berbagai daerah yang belajar di PGA Pekalongan. Demikian juga kami menerima santri non mukim (santri kalong). Tetapi karena sistem demikian dianggap merancukan tujuan pesantren salaf sebagaimana di awal pendiriannya, akhirnya kami hanya menerima santri mukim saja. Kini pesantren kembali membolehkan santrinya belajar di lembaga pendidikan formal yang ada di luar lingkungan pondok pesantren, dan membuka pengajian umum untuk masyarakat pada waktu pagi dan siang hari (*dhuha awal* dan *dhuha tsani*). Madrasah diniyah pun sedang kita kaji bersama penyelenggaraannya.

Dengan demikian, sebagai lembaga yang didirikan secara mandiri oleh seorang kyai atau beberapa kyai, pesantren memiliki keunikan tersendiri dibanding lembaga pendidikan lainnya, disebabkan Pesantren lahir dari perut rakyat sendiri, tetapi tidak lantas menolak atau mengingkari berbagai adaptasi sistem atau model pendidikan lainnya sebagai dampak dinamikanya di tengah modernitas.

Jadi, pengembangan pesantren dari model salaf murni menuju pesantren yang menyelenggarakan lembaga pendidikan menunjukkan pembaharuan ke arah peningkatan mutu pendidikan pesantren. Hal ini paralel dengan tantangan dunia pendidikan pesantren menghadapi era global, yakni mampu tetap mengfungsikan dirinya sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* sekaligus lembaga yang mampu melahirkan intelektual ulama dan ulama intelektual.

B. Tujuan Formalisasi Pesantren

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan, yang akan mengantar pendidikan menuju keberhasilannya. Tanpa tujuan yang jelas, maka proses pendidikan yang berisi materi, metode dan alat pembelajaran tidak akan tercapai dan kabur dari visi awalnya.

Memahami arti pentingnya tujuan pendidikan, pesantren-pesantren yang diteliti pun sejak awal pendiriannya memiliki tujuan kependidikannya. Dalam konteks ini, mutu pendidikan pesantren amat tergantung dari tujuan dan visi yang dikehendaki pendiri dan kyai pengasuh.

Pesantren Sunan Bonang Al-Hidayah yang didirikan KH Mubarizi misalnya, berdasarkan wawancara dengan pengurus pesantren, Zamroni, tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah: ...untuk membina kesejahteraan umat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, dalam rangka menuju terwujudnya adil makmur yang diridhai Allah yang Maha Esa.

Hal senada dituturkan oleh Almaidah, santri Pesantren Mambaul Falah Sampangan. Menurutnya, berdirinya pondok pesantren ini bertujuan untuk mendidik santri agar menjadi manusia muslim yang menguasai ilmu agama sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab kuning.

Tidak jauh berbeda, K.H. Zaenal Arifin, pimpinan Pesantren Al-Arifiyah mengatakan:

Sejak berdirinya di tahun 1980, pesantren ini intens dalam dunia pendidikan Islam. Kami memberikan bekal kepada para santri dengan ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang muncul pada abad pertengahan atau yang biasa dikenal dengan nama kitab kuning agar para santri mampu menguasai ilmu agama setelah mereka pulang ke kampung halamannya.

Persoalannya, tujuan yang dirumuskan seringkali abstrak, tidak memiliki formulasi yang jelas, baik pada tataran institusional, kurikuler, maupun instruksional umum dan khusus. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada pesantren-pesantren yang ada di Kota Pekalongan yang hampir semuanya bercorak salafiyah tidak dijumpai rumusan tujuan pendidikan pesantren yang jelas dan standar yang berlaku umum bagi semua pesantren. Menurut Mastuhu, independensi pesantren agaknya yang melatarbelakangi beragamnya tujuan (Mastuhu, 1994: 59).

Ketika pesantren-pesantren yang ada melakukan formalisasi, tentu dengan berbagai model dan corak masing-masing, nampak bahwa tujuan yang dikehendaki masing-masing pesantren juga berbeda-beda, karena tiadanya rumusan yang baku. Kecenderungan pesantren yang diteliti, secara tidak langsung, mengorientasikan formalisasi pendidikannya sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren agar tidak tertinggal mutunya dengan pendidikan persekolahan pada umumnya, meski pada kenyataannya formalisasi pendidikan telah 'terjebak' pada upaya untuk mempertahankan kelangsungan (*survive*) pesantren dari serbuan sistem pendidikan persekolahan dan madrasah.

Penjelasan apik mengenai hal ini disampaikan oleh K. Sa'dullah, Kepala MA Ribbatul Muta'allimin Landungsari.

Ketika pihak pesantren melihat perubahan suasana dalam dunia pendidikan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, dimana Departemen Agama mulai menerima secara sadar madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam, kami memanfaatkan momentum itu sebagai sarana untuk memajukan institusi kami. Dari dulu, santri pesantren kami jumlahnya hanya puluhan orang saja. Ketika dibuka Madin, MTs, dan MA, Pesantren Ribbatul Muta'allimin kini semakin maju. Artinya, dengan semakin banyaknya santri dan siswa-siswi yang ada di bawah lembaga pendidikan pesantren Ribatul Mutaallimin, kelangsungan pesantren kami diasumsikan akan terjaga.

Apa yang disampaikan oleh K. Sa'dullah memberikan pemahaman korelasional bahwa kemajuan dan mutu pesantren yang diteliti pada umumnya masih diindikasikan dengan variabel sedikit-banyaknya jumlah santri. Semakin banyak santri, semakin maju

dan bermutu pesantren, sebaliknya, semakin sedikit santri, merosot pula kemajuan dan mutu pesantren yang ada.

Formalisasi pesantren pun, yang pada awalnya ditanggapi pro-kontra (Masdar, 2001), memunculkan kegamangan dalam implementasinya. Apakah akan mampu meningkatkan mutu pendidikan pesantren, ataukah justru membuat merosot mutu pesantren. Kegamangan ini nampak dari kebijakan yang diambil pesantren dalam menerapkan formalisasi secara berhati-hati.

Pesantren Al-Arifiyah, sejak berdiri tahun 1980, telah menerapkan formalisasi pesantren dengan pola pesantren sebagai asrama pelajar (khususnya pelajar PGA Pekalongan) dan mahasiswa (IAIN Semarang Cabang Pekalongan) hingga tahun 1989 dengan jumlah santri mencapai 300 orang. Pada tahun 1990-2003, karena ingin fokus sebagai pesantren salaf, pesantren milik KH. Zaenal Arifin ini menutup pola asrama. Penutupan ini berdampak pada menurunnya jumlah santri hingga tersisa sekitar 70 orang. Selanjutnya sejak tahun 2004–2008, santri Pesantren Al-Arifiyah diperbolehkan belajar di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi yang ada di sekitar Pekalongan. Kebijakan ini membuat jumlah santri melonjak 2 kali lipat mencapai 150 orang.

Lalu ada Pesantren Sunan Bonang, Al-Masyhad, dan Mambaul Falah. Ketiga pesantren yang berdomisili di Sampangan ini, dulunya pesantren besar dengan corak salafiyah murni.

Pertama, Pesantren Sunan Bonang. Pesantren ini merupakan pesantren yang telah berdiri sejak 1965, dengan mengambil corak salafiyah. Pada sekitar tahun 1980-1989, para santrinya kebanyakan para pelajar dari berbagai daerah yang di samping belajar ilmu agama (baca: kitab kuning) di pesantren, mereka juga menimba ilmu pengetahuan di madrasah dan sekolah, khususnya di PGAN Pekalongan. Ketika PGAN diubah statusnya menjadi MAN 2 Pekalongan, santri dari berbagai daerah berkurang. Bersamaan dengan itu, keterlibatan kyai pengasuh ke dalam partai politik –yang ditanggapi sebagian santri sebagai langkah yang tidak populer-- yang sedang berkuasa pada pemilu 1992, membuat jumlah santri hanya tinggal hitungan jari. Pada tahun 2008, santri pesantren yang didirikan KH. Mubarizi ini berjumlah 8 orang laki-laki, hampir semuanya kuliah di STAIN Pekalongan.

Kedua, Pesantren Al-Masyhad. Kondisi pesantren ini hampir sama dengan Pesantren tersebut di atas. Formalisasi pesantren telah membuat jumlah santri bertambah menjadi sekitar 200-an orang. Kini tinggal 16 orang.

Ketiga, Pesantren Mambaul Falah. Pondok pesantren terakhir ini diasuh oleh KH. Hasanuddin. Jumlah santrinya mencapai 27 orang, semuanya perempuan. Kedua pondok pesantren tersebut belakangan, pada tahun 1980-1989 juga menerima santri asrama yang bersekolah di PGAN Pekalongan. Sekitar tahun 1990-2000, pesantren mengeluarkan kebijakan melarang santrinya sekolah di luar. Artinya, santri mukim hanya belajar ilmu pengetahuan di pondok saja melalui kitab kuning. Tahun 2000 hingga sekarang, formalisasi kembali diterapkan, meski dengan pola agak berbeda, yakni pendirian madin, sistem majelis ta'lim, dan hampir semua santrinya sekolah atau kuliah di luar lingkungan Pesantren.

Menurut KH. Hasanuddin sebagaimana dikutip Almaidah (sudah disebutkan di atas):

Menurut abah, mutu pesantrennya, jika dibandingkan dulu dan sekarang, sekarang jauh lebih merosot. Semua santri kini tanggung penguasaan keilmuannya. Kitab kuning tidak bisa, ilmu umum juga *ngambang*. Usaha-usaha yang dilakukan ke arah tujuan peningkatan mutu pesantren yang lebih baik pun belum berhasil. Bahkan kami menggabungkan Pesantren Al-Masyhad dan Pesantren Mambaul Falah dalam satu kepengasuhan kyai.

Kondisi Pesantren Sunan Bonang Al-Hidayah lebih menggenaskan. Formalisasi pesantren yang sedang diusahakan melalui penyelenggaraan madrasah diniyah (madin) dan majlis ta'lim belum menunjukkan ke arah perubahan peningkatan kualitas. Jazil, santri dan pengurus Pesantren tersebut menuturkan.

Saat ini, pesantren tidak memiliki kepemimpinan individual-kharismatik layaknya pesantren salaf pada umumnya. Putra kyai pun 'enggan' untuk menjadi pengasuh pesantren. Akhirnya, orang lain yang tidak memiliki genealogi pesantren kami yang dicawel-cawel. Persoalannya kemudian, secara operasional, kepengurusan pesantren sehari-hari dijalankan oleh para alumni pesantren.

Gambaran di atas menunjukkan, sebagian pesantren terjebak dengan dinamika pendidikan madrasah dan persekolahan. Ada pesantren yang dahulunya maju, setelah memformalisasikan pendidikannya, kini kondisinya *la yamutu wa la yahya*. Semua itu disebabkan karena ketidaksiapan pengasuh dan orientasi yang tidak jelas dari formalisasi pendidikan yang dilaksanakan pesantren.

C. Dampak Formalisasi Terhadap Transformasi Pendidikan Pesantren

Formalisasi pesantren di institusi-institusi pesantren yang diteliti, tampak memunculkan dua wajah berbeda, tergantung dari kacamata mana memandangnya; yakni dampak positif dan dampak negatif. Bisa jadi, cara pandang eksternal mengatakan, sebuah pesantren yang memformalisasikan pendidikannya dinilai meningkat mutunya, tetapi menurut lingkungan internal pesantren dinilainya merosot. Hal demikian, sekali lagi, disebabkan independensi dan cara pendiri atau kyai pengasuh pesantren merumuskan mutu kependidikan sesuai dengan corak yang dikehendaknya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai dalam menentukan dampak formalisasi terhadap mutu pendidikan pesantren menggunakan pendekatan manajemen pendidikan, yakni berkenaan faktor kepemimpinan pesantren, sistem, kurikulum, dan metode.

1. Transformasi Kepemimpinan

Dalam tradisi pesantren, kyai merupakan elemen vital dari sebuah pondok pesantren. Oleh Gus Dur, figur kyai digambarkan memiliki kedudukan ganda: sebagai pengasuh sekaligus pemilik pesantren. Secara kultural, kedudukan ini sama dengan kedudukan bangsawan feodal yang di Jawa dikenal dengan nama *kanjeng*. (Gus Dur, tt.: 20). Tradisi feodalisme telah menjadikan kyai memiliki kebijakan dan kewenangan absolut.

Dalam penelitian ini, baik Pesantren Al-Arifiyah, Pesantren Mambaul Huda, Pesantren Ribatul Mutaallimin, Pesantren Mambaul Falah, Pesantren Al-Masyhad, dan Pesantren Sunan Bonang semuanya berbasis tradisional atau salaf. Dalam posisi demikian, segala bentuk kebijakan pendidikannya baik menyangkut format kelembagaan, kurikulum yang dipakai, metode pengajaran, maupun secara global sistem pendidikan yang dipakai mutlak kehendak kyai.

Nasib formalisasi yang masuk ke pesantren-pesantren tersebut juga berada di tangan kyai. Maka seperti diungkapkan di atas, ada pesantren yang melanjutkan formalisasi (Pesantren Ribatul Mutaallimin) dan ada yang menghentikan dan mengubahnya dalam corak lain (Pesantren Mambaul Falah, Pesantren Al-Masyhad, Pesantren Sunan Bonang, Pesantren Mambaul Huda, dan Pesantren Al-Arifiyah).

Kyai Syatibi dan K. Sa'dullah (Kepala MTs dan MA) Ribat menjelaskan dukungannya terhadap formalisasi yang dilaksanakan pengasuh Pesantren Ribatul Mutaallimin sebagai berikut:

...setelah kyai mengeluarkan kebijakan menyelenggarakan formalisasi, kajian keilmuan di pesantren kami semakin marak, tidak hanya dalam bidang ilmu agama (aqidah, tafsir, fiqh, tasawuf, dan falak, melainkan juga dalam bidang bahasa dan sastra serta ilmu pengetahuan umum. Lalu, visi pesantren kami pun mengalami dinamika, dari kedudukannya sebagai lembaga yang *concern* memberikan ilmu pengetahuan agama menjadi lembaga pendidikan terpadu yang memberikan pendidikan dan pengetahuan dalam bidang agama Islam dan bidang pendidikan umum, sosial dan masyarakat. Formalisasi ternyata tidak menggerus pola tradisional pesantren kami yang tetap memberikan pengajaran kitab kuning secara internal. Bahkan di lembaga formal pun kitab kuning dijadikan materi pelajaran.

Sementara itu, kebijakan mutlak kyai di Pesantren Mambaul Falah, Pesantren Al-Masyhad, Pesantren Sunan Bonang, Pesantren Mambaul Huda, dan Pesantren Al-Arifiyah, membuat nasib formalisasi "terkatung-katung." Hal ini disebabkan karena kebijakan kyai Pesantren tersebut "setengah hati" menyambut formalisasi. Maka ketika formalisasi "diujicobakan" lagi ada kesan hal ini dilakukan demi melanggengkan eksistensi pondok pesantren.

K.H. Zaenal Arifin menggambarkan:

Ketika beberapa pesantren telah mendirikan lembaga pendidikan formal, Pesantren Al-Arifiyah tidak melakukannya. Kami hanya menerima santri asrama dari pelajar yang sekolah di PGA Pekalongan. Tentu kami tidak menyangka kebijakan Departemen Agama berubah di akhir tahun 1989-an. Ternyata, kebijakan itu sedikit-banyak berpengaruh terhadap kelangsungan pesantren ini. Dalam konteks demikian, sesungguhnya kami hanya mengikuti arus saja. Kini, kami mulai kembali menerima santri yang sekolah di luar.

Hal agak berbeda dituturkan KH. Hasanuddin Sampangan, pengasuh Pesantren Al-Masyhad:

Kami sejak awal sebenarnya condong di pengajian kitab kuning. Tapi ketika santri-santri kami pada belajar di luar, kami merasa bahwa penguasaan kitab kuning menurun. Maka kami mengeluarkan kebijakan untuk melarang santri pesantren kami sekolah di luar. Saat ini, kami kembali menerima santri yang juga nyambi sekolah/kuliah. Kenyataannya, hampir semua santri kami adalah mahasiswa.

Pada pesantren pertama, ketika kyai Pesantren Ribat mendukung formalisasi, pesantren kemudian membangun infrastruktur dan kelembagaan pendidikan formal untuk mendukungnya. Sementara pada pesantren kedua dan ketiga di atas, kebijakan formalisasi tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan lembaga pendidikan formal yang mendukungnya.

Pada lembaga pesantren seperti Ribat di atas, sistem kepemimpinan telah bergeser dari kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif yayasan. Peran kyai meski masih dominan, tetapi melibatkan unsur kepemimpinan lain, seperti kepala madrasah, guru, dan bahkan santri senior. Sementara di dua pesantren tersebut kebijakan kyai tidak mampu mendukung formalisasi. Pesantren Sunan Bonang, yang kini ditangani secara kolektif, tidak mampu mengembalikan kejayaan pesantren ini sebagaimana dulunya. Hal ini disebabkan setidaknya dua faktor: (1) kepemimpinan pengasuh yang tidak lagi kharismatik; dan (2) kecenderungan masyarakat sekitar menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan agama non pesantren, seperti MI, MTs dan MA. Bagi masyarakat sekitar, kini ada satu asumsi: "ngga mondok ngga apa-apa, asalkan anaknya masih sekolah agama."

2. Transformasi Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan pesantren memiliki sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Maka pesantren menghadapi dilema untuk mengintegrasikan sistem

pendidikan yang dimiliki dengan sistem pendidikan nasional. Tetapi hal ini bisa dimaklumi karena sejak awal berdirinya, pesantren tidak dimaksudkan untuk meleburkan dirinya ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pesantren benar-benar sistem pendidikan independen yang muncul dari keinginan rakyat (masyarakat muslim Indonesia) agar memiliki lembaga pendidikan tersendiri tanpa intervensi dari kalangan luar. Maka ketika kolonial Belanda berusaha intervensi, pesantren mengambil strategi isolasi dan konservasi. Strategi ini justru dinilai sebagian kalangan sebagai citra negatif pesantren yang tidak mau terbuka terhadap dinamika pendidikan nasional.

Formalisasi pesantren yang digulirkan pemerintah pada tahun 1970-an sejatinya dimunculkan untuk membantah sinyalemen tersebut. Jika sebelumnya sistem pendidikan pesantren dikenal sebagai bentuk sistem pendidikan non sekolah (kelas *bandongan/halaqah* tradisional), yang muncul kemudian justru bentuk sistem pendidikan sekolah; mulai dari MI, MTs, MA SLTP/SLTA umum, perguruan tinggi keagamaan bahkan perguruan tinggi umum. Jika semula penyelenggaraan pendidikan di pesantren dilakukan tradisional, kini diselenggarakan dengan sistem modern seperti sekolah agama yang dikembangkan Departemen Agama.

Pesantren Ribatul Mutaallimin agaknya mengikuti tren ini dengan mendirikan MTs dan MA Kurikulum Depag dan Madrasah Diniyah Salafiyah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dengan kurikulum pesantren). Selain itu, pesantren tersebut tetap menyelenggarakan pendidikan pesantren salafi murni bagi para santri dengan materi kitab-kitab kuning seperti: *Tafsir Jalalain, Fathul Muin, Nashaikh al-Diniyah, al-Jurumiyah*, dan lain-lain. Sistem pendidikan di Ribat saat ini menurut kalangan internal pesantren menjadi contoh penerapan formalisasi bagi pondok pesantren lain di Kota Pekalongan dan sekitarnya.

Surono, pengurus Pesantren Ribat menuturkan fenomena tersebut:

Alhamdulillah, kebijakan pesantren mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah payung pesantren yang terdiri dari Madrasah Salafiyah (kurikulum pesantren), MTs dan MA (kurikulum Depag) dan bidang usaha seperti koperasi simpan pinjam, kursus menjahit, dan foto copy telah menjadikan pesantren kami maju dan kondusif. Lihat saja, kurikulum pesantren lain banyak yang meniru sistem yang kurikulum yang kami buat.

Pada pesantren lain, yakni Pesantren Al-Arifiyah, Sunan Bonang, Al-Masyhad, Mambaul Huda, dan Mambaul Falah, sistem pesantren masih salafiyah, hanya saja bentuk formalisasinya tidak dengan mendirikan lembaga pendidikan formal, tetapi mendirikan madrasah diniyah, majlis ta'lim atau asrama para pelajar yang mondok di pesantren-pesantren. Sistem formalisasi yang dilaksanakan pondok pesantren-pondok pesantren terakhir nyatanya tidak mempengaruhi perkembangan pesantren secara kondusif.

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada metode dan materi pengajarannya. Pada Pesantren Ribatul Mutaallimin, metode pengajaran telah menempuh kurikulum campuran (integratif) antara yang agama dan umum, dan ini bisa dipenuhi melalui pengajaran di MTs dan MA dengan kurikulum Depag. Sementara di pesantren lain yang diteliti, kebutuhan materi pelajaran umum bisa dipenuhi di sekolah atau perguruan tinggi di luar lingkungan pesantren.

Pada pesantren-pesantren yang diteliti, secara umum, terjadi perubahan sistem pengajaran yang berpusat pada kyai mulai ditinggalkan, apalagi banyak alumni IAIN/STAIN, dan PTU yang menjadi tenaga pegajar di pesantren-pesantren tersebut. Demikian pula, evaluasi pendidikan yang semula dilaksanakan dengan ujian lisan kini mengalami perubahan ke arah evaluasi tertulis dan berjangka model UTS, UAS dan UN.

Perubahan ini begitu nampak di Pesantren Ribatul Mutaallimin yang menerapkan sistem pendidikan formal. Penilaian pendidikan di MTs dan MA yang menggunakan kurikulum Depag dilakukan dengan mengikuti prosedur evaluasi yang dilakukan oleh Depag melalui ulangan harian, ujian semester, dan Ujian Nasional (UN). Dengan demikian, penilaian dilakukan dengan menggunakan ujian tertulis. Dialog dan diskusi -- yang lebih mengedepankan keterampilan olah oral-- tidak dilakukan pada ajang ujian, tetapi lebih dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan di pesantren lain, format evaluasi tidak jelas. Pada Pesantren Mambaul Falah dan Al-Mayhad, meski ada diniyah, yakni Siraajuthoolibiin, tetapi tidak jelas model evaluasinya. Di Mambaul Huda Landungsari dan Sunan Bonang Sampangan, kecerdasan santri diukur bukan dengan evaluasi tersistem, tetapi dari lamanya santri belajar dan penguasaan santri terhadap kitab yang dibacanya.

Perpaduan antara sistem pesantren yang tradisional dan sistem pendidikan formal tersebut dalam beberapa aspek menimbulkan kelemahan. Abdurrahman Wahid menilai perpaduan ini menyebabkan pesantren mengalami krisis identitas (Gus Dur: 103-104); para santrinya canggung dalam penguasaan ilmu agama (kitab kuning) dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan umum ketika lulusannya dihadapkan dengan lulusan pendidikan umum. Sedangkan Mujamil Qomar menilainya sebagai penyebab melemahnya sikap independensi pesantren (Mujamil Qomar, tt., 81-82); pesantren tidak bisa lagi secara mutlak dalam menentukan kebijakannya.

Meski demikian, sistem pesantren yang memformalisasikan pendidikannya telah diadopsi secara 'diam-diam' oleh lembaga-lembaga pendidikan umum unggulan dengan apa yang disebutnya *boarding shool* (sekolah berasrama) atau *fullday school*. Baik *boarding shool* maupun *fullday school* menganggap bahwa sistem pesantren yang selama ini berjalan memunculkan nilai kontinuitas dan intensifikasi dalam interaksi pembelajaran di lembaga pendidikan. Hubungan kyai-santri dianggap bukan sekedar hubungan guru-murid sebagaimana terjadi di lembaga pendidikan umum yang hanya bersifat formil, tetapi hubungan yang dilandasi oleh ruh pendidikan itu sendiri. Demikian pula waktu belajarnya yang 24 jam jika dioptimalkan akan memunculkan energi intelektual dan spiritual yang tinggi.

Dari cara pandang manajemen modern ini, sistem pesantren dinilai sukses dan mampu beradaptasi dengan modernitas pendidikan di saat lembaga pendidikan sekuler dianggap gagal menjalankan perannya.

3. Transformasi Kurikulum

Secara umum, materi pelajaran yang dipakai oleh pesantren-pesantren yang diteliti tidak lepas dari bentuk yang sederhana, yakni inti ajaran Islam yang mendasar: rukun Islam, rukun iman, dan akhlak. Jika diuraikan berdasar bidang keilmuan, terdapat ilmu sharaf dan nahwu, ilmu fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam (tauhid), ilmu tasawuf, dan sebagainya. Kurikulum yang dipakai pun terus mengalami dinamika, sesuai perkembangan sistem dan kelembagaan pesantren masing-masing. Meskipun begitu, kitab yang dipakai antara pesantren satu dan lainnya relatif tidak sama.

Kurikulum Al-Masyhad dan Mambaul Falah bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

NO	KELOMPOK KITAB	NAMA KITAB
1.	Ulum al-Qur'an	a. <i>At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an</i> b. <i>Qiraat al-Qur'an</i>
2.	Tafsir	<i>Tafsir al-Munir</i>

3.	Aqidah	a. <i>Aqidah al-Awam</i> b. <i>Sulam al-Taufiq</i> c. <i>Nashaih al-Ibad</i>
4.	Sejarah	a. <i>Kifayah al-Ashaab</i> b. <i>Maulid ad-Dibaiyyah</i>
5.	Akhlak/tasawuf	a. <i>Akhlaqu li al-Banin</i> b. <i>Minhaj al-Abidin</i> c. <i>Qurratul 'Uyun</i> d. <i>'Usfuriyyah</i>
6.	Fiqh	a. <i>Kifayat al-Akhyar</i> b. <i>Fathul Qorib</i> c. <i>Safinat an-Najat</i>
7.	Ushul Fiqh	<i>Mabadi al-Fiqhiyyah</i>
8.	Hadits	<i>Durratun Nashihin</i>
9.	Nahwu Sharaf	<i>Matan Jurumiyah</i>

Sumber: Kurikulum Pondok Pesantren Al-Masyhad-Mambaul Falah

Sementara Kurikulum Pesantren Ribatul Mutaalimin terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

NO	KELOMPOK KITAB	NAMA KITAB
1.	Ulum al Qur'an	<i>Al-Itqan</i>
2.	Tafsir	a. <i>Tafsir As-Shawy</i> b. <i>Tafsir Yaasin</i> c. <i>Tafsir Jalalain</i>
3.	Fiqh	a. <i>Fath al-Mu'in</i> b. <i>Fath al-arib</i>
4.	Tasawuf	a. <i>Nashoih al-Diniyah</i> b. <i>Bahjah al-Wasaail</i> c. <i>Majaalis al-Tsaniyyah</i>
5.	Ushul Fiqh	<i>Mabadi al-Fiqhiyyah</i>
6.	Hadits	<i>Abi Jamrah</i>
7.	Nahwu/Sharaf	a. <i>Al-Jurumiyah</i> b. <i>Al-Kailany</i> c. <i>Alfiyah Ibnu Malik</i>

Sumber: Kurikulum Pondok Pesantren Ribatul Mutaalimin

Menariknya, ketika 3 pesantren di atas mendirikan madrasah diniyah dan pendidikan formal, maka kurikulum pesantren salafnya tetap dipertahankan. Adapun kurikulum yang ada di madrasah diniyah merupakan kurikulum pendukung dan pengembangan dari kurikulum salafnya.

Kurikulum Madrasah Diniyah Siroojuthoolibiin Pesantren Al-Masyhad-Mambaul Falah sebagaimana tersebut dalam table 3 berikut:

NO	KELAS	NAMA KITAB
1.	Pemula	a. <i>Mabadi al-Fiqhiyyah</i> b. <i>Tarjamah al-Jurumiyah</i>

		<i>c. Al-Amtsilat al-Tashrifiyah</i> <i>d. Aqidah al-Awam</i>
2.	Satu (I)	<i>a. Al-Amtsilat al-Tashrifiyah</i> <i>b. Mabadi al-Fiqhiyyah</i> <i>c. Nahwu Tarjamah</i> <i>d. Qatrul Ghaitis</i> <i>e. Durarul Bahiyyah</i> <i>f. Tajwid</i>
3.	Dua (II)	<i>a. Matan Taqrib</i> <i>b. Akhlaq li al-Baniin</i> <i>c. Risalah Baiquniyyah</i> <i>d. al-Targhib wa al-Tarhiib</i> <i>e. Nadzam Maqsud wa I'laal</i> <i>f. Al-Jurumiyah</i>
4.	Tiga (III)	<i>a. Imrithy</i> <i>b. Ta'lim al-Muta'allim</i> <i>c. Abi Jamrah</i> <i>d. Hujjah ahlu Sunnah</i> <i>e. Khulashah Nurul Yaqiin</i> <i>f. Matan Taqriib</i>

Sumber: Kurikulum Madrasah Diniyah Sirajutthoolibiin Pondok Pesantren Al-Masyhad-Mambaul Falah Sampangan.

Pada Pesantren Ribatul Mutaallimin, kurikulum madrasah diniyah lebih beragam lagi, disesuaikan jenjang pendidikannya yang terdiri dari Tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sedangkan Pesantren Mamba'ul Huda dan Pesantren Sunan Bonang, karena hampir semua santrinya sekolah/kuliah di luar, kurikulumnya tidak begitu padat dan efektif diberikan dari waktu ashar hingga shubuh. Di antara kitab kuning yang diberikan di Sunan Bonang adalah: *Ratib Al-Attas*, *Nailu al-Roja*, *Hujjah Ahl Sunnah*, *Arbain Nawawiyah*, *Bidayah al-hidayah*, *Jurumiyah*, *Amtsilat al-Tashirifiyah*, *Ta'lim al-Mutaallim*, *Lughatul Arabiyah* dan *Minakhus Tsaniyah*.

Kurikulum Pesantren Mambaul Huda sebagaimana terdapat tabel 4 berikut:

NO	KELOMPOK KITAB	NAMA KITAB
1.	Ulum al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risalah al-Qurra</i> • <i>Qira'at al-Qur'an</i>
2.	Fiqh	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fath al-Qarib</i>
3.	Akhlak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nashoih al-Ibad</i>
4.	Hadits	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Abi Jamrah</i>
7.	Nahwu/Sharaf	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Amtsilat al-Tashrifiyah</i> • <i>Al-Jurumiyah</i> • <i>Qawaid Lughah al-Arabiyah</i>

Sumber: Kurikulum Pondok Pesantren Mambaul Huda

Dari tabel 1-4 di atas diketahui bahwa meski secara kelompok keilmuan sama, tetapi kitab kuning yang diajarkan berbeda. Ini menunjukkan, kurikulum pesantren sangat variatif dan independen, terantung kehendak kyainya. Dilihat dari perspektif ini, Tolkhah

Hasan sebagaimana dikutip Mujamil Qomar, justru mendukung variasi kurikulum pondok pesantren dan tidak menyetujui penyeragaman (uniformitas) kurikulum pesantren sebagaimana lembaga pendidikan madrasah dan sekolah. Penyamaan kurikulum terkadang justru membelenggu kemampuan santri seperti pengalaman madrasah yang mengikuti kurikulum pemerintah, yang pada kenyataannya, lulusan pesantren hanya memiliki kemampuan keilmuan setengah-setengah (Mujamil Qomar, tt., 112).

Dari paparan materi pelajaran di pesantren tersebut di atas, dapat digeneralisasikan bahwa kajian keilmuan pesantren didominasi ilmu-ilmu agama. Dominasi ini pada akhirnya menciptakan penghalang mental yang sangat besar di kalangan pesantren untuk menerima sekolah umum dalam lingkungannya sendiri. Dalam kerangka ini, beberapa pesantren yang sempat menarik diri dari formalisasi seperti Al-Arifiyah, Al-Masyhad, Mambaul Huda, Mambaul Falah dan Sunan Bonang disebabkan karena tekanannya yang kuat pada ilmu agama.

Memang titik pusat pengembangan keilmuan di pesantren adalah ilmu-ilmu agama. Tetapi ilmu agama tidak akan berkembang dengan baik tanpa ditopang ilmu-ilmu lain. Dalam kerangka ini, Ribatul Mutaallimin menerima sistem pendidikan madrasah dengan kurikulum Depag. Jadi, orientasinya tetap ilmu agama. Ilmu umum hanya dipandang sebagai kebutuhan atau tantangan. Tantangan untuk menguasai pengetahuan umum itu merupakan salah satu tugas yang mesti dilaksanakan pesantren.

Karena pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mandiri, maka Pesantren Ribatul Mutaallimin kemudian memberikan pelajaran keterampilan. Tujuannya adalah agar santri mampu hidup secara mandiri di tengah-tengah masyarakat, ketika kembali ke kampung halamannya. Jenis keterampilan yang diberikan berupa kursus menjahit, koperasi, simthuddurar, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar.

4. Transformasi Metode Pembelajaran

Dalam rangkaian sistem pembelajaran, metode menempati urutan sesudah materi (kurikulum). Penyampaian materi tidak berarti tanpa melibatkan metode (Mujamil, tt., 141). Di samping pergeseran sistem, kelembagaan, dan kurikulum, pesantren juga mengalami pergeseran metode pengajarannya.

Pada mulanya, semua pesantren yang diteliti menggunakan metode-metode yang bersifat tradisonal, yakni: *sorogan*, *wetonan*, *majlis ta'lim*, dan lain-lain. Belakangan, ketika model dan corak pesantren mengalami dinamika ke pesantren semi salaf, metode pembelajaran pun mengalami 'penyempurnaan'. Ada diskusi, tanya jawab, resitasi, *problem solving* (*bahtsul masail*), dan lain-lain.

Semua pesantren yang diteliti, metode pembelajaran pada sistem salafinya masih menggunakan metode, ceramah, hafalan, *sorogan* dan *bandongan* (*wetonan*) dan *majlis ta'lim*.

Untuk lebih jelasnya, metode pembelajaran salafi di Pesantren Al-Arifiyah, Ribatul Mutaallimin, Al-Masyhad, Mambaul Huda, Mambaul Falah, dan Sunan Bonang bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

No	Metode	Aspek Penguasaan Materi	Peran dalam PBM
1	Wetonan	Kognitif	Kyai/ustadz/guru
2	Sorogan	Kognitif	Kyai/ustadz/guru
3	Hapalan	Kognitif	Kyai/ustadz/guru
4	Ceramah	Kognitif	Kyai/ustadz/guru

Sementara pada madrasah diniyah di Pesantren Al-Arifiyah, Ribatul Mutaallimin, Sunan Bonang, Al-Masyhad, dan Mambaul Falah serta MTs dan MA Ribatul Mutaalimin dengan kurikulum Depag telah berkembang ke metode tanya jawab, diskusi, resitasi, kerja kelompok, dan *problem solving (bahtsul masail)*.

Perkembangan metode pembelajaran di pesantren-pesantren yang diteliti adalah sebagaimana pada tabel 6 berikut:

No	Metode	Aspek Penguasaan Materi	Peran dalam PBM
1	Tanya jawab	Kognitif, afektif	Kyai/ustadz, santri
2	Diskusi (dialog)	Kognitif, afektif	Kyai/ustadz, santri
3	Resitasi	Kognitif	Kyai/ustadz/guru
4	Kerja kelompok	Kognitif, motorik, afektif	Kyai/ustadz, santri
5	<i>problem solving (bahtsul masail)</i> .	Kognitif, motorik, afektif	Kyai/ustadz, santri

Pada tabel 5 di atas diketahui, metode dan proses pembelajaran di Pesantren Al-Arifiyah, Ribatul Mutaallimin, Al-Masyhad, Mambaul Huda, Mambaul Falah, dan Sunan Bonang dari mulai ceramah, hafalan, *sorogan* dan *bandongan (wetonan)* dan *majlis ta'lim* nampak sekali dominasi kyai/guru/ustadz sebagai ujung tombak pembelajaran (*teacher oriented*) dengan santri sebagai objeknya, sehingga kegiatan pembelajaran tidak berkembang dua arah (*feed back*). Proses pembelajaran lebih ditujukan pada penguasaan kognitif (pengetahuan) saja. Santri --dalam metode dan PBM demikian-- hanya *sami'na wa atha'na*; mendengarkan, menyimak dan mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan oleh sang kyai.

Sementara itu dengan melihat tabel 6, madrasah diniyah di Pesantren Al-Arifiyah, Ribatul Mutaallimin, Sunan Bonang, Al-Masyhad, dan Mambaul Falah serta MTs dan MA Ribatul Mutaalimin dengan kurikulum Depag berusaha menyeimbangkan antara proses belajar mengajar *teacher oriented* dan *student oriented*. Dalam metode resitasi, ustadz/guru menjadi pusat belajar. Sedangkan dalam metode diskusi, tanya jawab, *problem solving*, dan kerja kelompok, santri diberi kesempatan luas untuk mengembangkan dirinya dalam proses pembelajaran. Artinya, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) melalui tanya jawab dan diskusi telah dilaksanakan di pesantren ini. Dampaknya, santri dan alumni pesantren ini tidak merasa asing mengeluarkan pendapat jika mengikuti forum-forum diskusi di luar pesantren. Sedangkan proses belajar mengajar ditujukan untuk penguasaan seluruh aspek pembelajaran, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Perkembangan metode pembelajaran pesantren menunjukkan bahwa pesantren telah menempuh sikap adaptif terhadap perkembangan pendidikan di lingkungannya. Kehadiran madrasah di lingkungan pesantren semakin memperkokoh usaha-usaha adaptasi metodik ini. Khusus untuk Pesantren Sunan Bonang, Al-Masyhad, Mambaul Falah, dan Mambaul Huda, metode diskusi agaknya perlu diintensifkan lagi, mengingat hampir semua santrinya adalah mahasiswa STAIN Pekalongan yang telah biasa berdiskusi di kampusnya.

Kesimpulan

Dari data lapangan diketahui bahwa hampir semua pesantren yang ada di Pekalongan pada awalnya adalah pesantren salaf murni. Tetapi ketika dihadapkan pada dinamika pendidikan nasional dan tantangan modernisasi, ramai-ramai pesantren memformalisasikan pendidikannya. Model dan corak dalam menyikapi dinamika ini pun bervariasi, tergantung 'selera' kyai pengasuh. Ada yang bercorak penyelenggaraan madrasah diniyah dengan kurikulum pesantren, madrasah dengan kurikulum Departemen

Agama, majlis ta'lim, dan corak asrama untuk para pelajar dan mahasiswa yang mondok di pesantren bersangkutan.

Pengambilan corak ini pun acapkali terkesan pragmatis, hanya didasarkan pertimbangan kebutuhan tertentu masyarakat terhadap pesantren dan pertimbangan kuantitas jumlah santri. Akibatnya, pesantren terkesan hanya menyediakan 'jasa pemondokan plus' bagi pelajar dan mahasiswa. Padahal sesungguhnya, pengembangan pesantren dari model salaf murni menuju pesantren yang menyelenggarakan lembaga pendidikan menunjukkan pembaharuan ke arah peningkatan mutu pendidikan pesantren. Hal ini paralel dengan tantangan dunia pendidikan pesantren menghadapi era global, yakni mampu tetap mengfungsikan dirinya sebagai lembaga *tafaqquh fi al-dîn* sekaligus lembaga yang mampu melahirkan intelektual ulama dan ulama intelektual.

Kecenderungan pesantren yang diteliti, secara tidak langsung, mengorientasikan formalisasi pendidikannya sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren agar tidak tertinggal mutunya dengan pendidikan persekolahan pada umumnya, meski pada kenyataannya formalisasi pendidikan telah 'terjebak' pada upaya untuk mempertahankan kelangsungan (*survive*) pesantren dari serbuan sistem pendidikan persekolahan dan madrasah.

Meski demikian, formalisasi pesantren di Kota Pekalongan menampakkan pergeseran signifikan terhadap pola kepemimpinan, kurikulum, institusi dan metodologi, dengan harapan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan pesantren di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, "Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Kompas*, 8 Juni 2001.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Anwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Azizy, Qodri Abdillah, "Memberdayakan Pesantren dan Madrasah," dalam pengantar *Dinamika Pesantren dan Madrasah.*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Dhofier, Zamakhsyarie, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999
- Fadjar, Malik, dkk., *Platform Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hadi, Amirul & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia: 2005.
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pondok Pesantren*, Jakarta: Cemara Indah, 1982.
- Kota Pekalongan dalam Angka 2004.*
- Kurikulum Pesantren Ribatul Mutaallimin 2007/2008.*
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994
- Mas' oed, Abdurrahman et.al, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Seri INIS XX, Jakarta: INIS, 1994.
- Mas'udi, Masdar F. "Madrasah dan Hancurnya Otoritas Kyai", *Kompas*, 22 September 2001
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2001
- Pradjarta, *Memelihara Umat; Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa*, Jogjakarta: LKiS, 1999, h. 25.

- Qomar, Mujamil, *Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, ttp.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", pengantar dalam *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985
- Satoto, "Nasib Batik Pekalongan Mencari Pasar Alternatif untuk Terus Bisa Hidup", dalam *Harian Sinar Harapan*, 2003.
- UU No. 20/2003 tentang *Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* Pasal 30 ayat 4.
- UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No 32/2004.
- van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, t.tp: CV Dharma Bhakti, tt.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M, 1986